

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan narkoba transnasional di Zona Ekonomi Khusus (ZEK) Laos selama periode pandemi Covid-19 berkembang sebagai persoalan keamanan yang semakin kompleks. Laos menempati posisi strategis di kawasan Segitiga Emas karena berada di antara wilayah produksi narkoba dan jalur distribusi menuju pasar regional. Posisi geografis tersebut, ditambah keberadaan kawasan ekonomi khusus dengan mobilitas manusia dan barang yang tinggi, menjadikan wilayah Laos rentan dimanfaatkan sebagai ruang transit maupun distribusi oleh jaringan kriminal lintas negara. Dengan demikian, dinamika perdagangan narkoba di ZEK Laos tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan domestik, melainkan sebagai bagian dari jaringan kejahatan transnasional yang bergerak melampaui batas negara.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi tersebut berkaitan erat dengan keterbatasan kapasitas negara dalam menjalankan pengawasan dan penegakan hukum secara merata di seluruh wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks Laos, pengelolaan kawasan perbatasan dan ZEK menghadapi tantangan berupa tingginya arus lintas batas, kompleksitas koordinasi antar lembaga, serta kebutuhan menjaga aktivitas ekonomi kawasan. Situasi ini mencerminkan kondisi *weak jurisdiction control*, yang terlihat dari masih tingginya aktivitas jaringan kriminal lintas negara di wilayah Bokeo dan GTSEZ, kuatnya keterlibatan aktor non-negara

dalam ekosistem kejahatan terorganisasi, serta masih terbatasnya kapasitas ketahanan negara dalam merespons ancaman tersebut.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, penelitian ini menemukan bahwa peran ASEANAPOL diwujudkan melalui pembentukan dan pemeliharaan mekanisme kerja sama yang memungkinkan negara anggota mengembangkan pola koordinasi yang lebih terstruktur dalam menghadapi perdagangan narkoba transnasional. Dalam perspektif rezim internasional, peran tersebut tercermin melalui pembentukan prinsip, norma, dan prosedur kerja bersama yang mengatur pertukaran informasi, komunikasi antar kepolisian, penguatan kapasitas aparat, serta koordinasi penanganan kejahatan lintas batas. Melalui mekanisme tersebut, ASEANAPOL membantu memperkuat kesiapan institusional negara anggota, termasuk Laos, dalam merespons ancaman perdagangan narkoba transnasional. Namun, kontribusi ASEANAPOL tidak hadir dalam bentuk operasi penindakan langsung, melainkan melalui fungsi koordinatif dan fasilitatif. Penelitian ini menemukan bahwa peran tersebut diwujudkan melalui pertukaran informasi, penguatan komunikasi antar kepolisian, forum kebijakan tahunan, pelatihan teknis, serta pengembangan instrumen pendukung seperti sistem basis data regional. Melalui mekanisme tersebut, ASEANAPOL membantu memperkuat kesiapan aparat nasional dalam merespons perdagangan narkoba lintas batas.

Meski demikian, implementasi kerja sama ASEANAPOL masih memiliki keterbatasan. Tingginya angka penyitaan narkoba di tingkat regional maupun nasional menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan aktif dan koordinasi antarnegara terus dilakukan, tetapi jaringan perdagangan narkoba tetap mampu

beradaptasi, mengubah rute distribusi, dan mempertahankan skala operasi yang besar. Temuan ini menunjukkan bahwa kerja sama ASEANAPOL berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas respons negara, namun belum sepenuhnya mampu menghilangkan enforcement gap yang muncul akibat keterbatasan kapasitas domestik dan kompleksitas tata kelola kawasan ZEK Laos.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa ASEANAPOL memiliki implikasi penting terhadap penanganan perdagangan narkoba di ZEK Laos sebagai instrumen pendukung koordinasi regional, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas aparat. Akan tetapi, implementasi akhirnya sangat bergantung pada kemampuan Laos dalam memperkuat kontrol yurisdiksi, meningkatkan kapasitas institusional, memperbaiki tata kelola kawasan perbatasan, dan menutup celah yang dimanfaatkan jaringan kriminal transnasional. Dengan kata lain, ASEANAPOL berfungsi sebagai penguat respons negara, bukan pengganti kekuatan negara itu sendiri.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah Laos perlu memperkuat pengawasan di kawasan ZEK dan wilayah perbatasan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, modernisasi sistem pengawasan, peningkatan profesionalisme aparat, serta pengetatan kontrol terhadap arus barang dan aktivitas ekonomi yang berisiko dimanfaatkan oleh jaringan kriminal.

Bagi ASEANAPOL, diperlukan optimalisasi mekanisme kerja sama yang telah ada, terutama dalam bidang pertukaran informasi dan pengembangan

kapasitas aparat penegak hukum. Sistem basis data regional perlu terus diperbarui agar lebih responsif terhadap perubahan pola kejahatan, sementara program pelatihan perlu diarahkan pada kemampuan investigasi finansial, pemanfaatan teknologi digital, dan penanganan jaringan kejahatan terorganisasi lintas negara.

Bagi negara-negara anggota ASEAN secara umum, penanganan perdagangan narkoba perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan, penguatan tata kelola perbatasan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kapasitas institusi nasional. Kerja sama regional akan lebih efektif apabila ditopang oleh kesiapan domestik masing-masing negara.

Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai perdagangan narkoba di kawasan Mekong masih terbuka luas untuk dikembangkan, terutama melalui studi komparatif antarnegara, analisis hubungan antara kawasan ekonomi khusus dan kejahatan transnasional, serta perkembangan ancaman narkoba pascapandemi. Dengan demikian, pemahaman mengenai dinamika kejahatan lintas negara di Asia Tenggara dapat semakin mendalam dan relevan dengan tantangan keamanan kawasan ke depan.